



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TRIWULAN II



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN 2019



**REFORMASI
HUKUM**

**PERKOKOH
e.gov**

**PASTI
Good Governance**

icare

ALWAYS THE BEST



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II PELAKSANAAN TUGAS	3
A. DIVISI ADMINISTRASI	3
B. DIVISI PEMASYARAKATAN	30
C. DIVISI KEIMIGRASIAN	33
D. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	37
BAB III PENUTUP	50
A. SIMPULAN	50
B. SARAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Penyusunan Program	3
Tabel 2 Kegiatan Peliputan	3
Tabel 3 Penyelenggaraan Kehumasan	16
Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	19
Tabel 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 7 Jumlah Kebutuhan Pegawai	22
Tabel 8 Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II (Januari s.d. Juni) Tahun 2019.....	25
Tabel 9 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II	30
Tabel 10 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30
Tabel 11 Data Napi/Narapidana pada Satuan Kerja	31
Tabel 12 Data Pemberian PB,CB, dan CMB	32
Tabel 13 Keadaan Klien Pemasarakatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Pemberian Paspor RI.....	34
Tabel 15 Pelayanan ITAS/ITAP	34
Tabel 16 Data Lalu Lintas Tempat Pemeriksaan Imigrasi	35
Tabel 17 Pengungsi di Dalam Rudenim.....	36
Tabel 18 Pengungsi di luar Rudenim.....	36
Tabel 19 Jenis Pelayanan Kewarganegaraan	38
Tabel 20 Permohonan HKI.....	38
Tabel 21 Pemberian Bantuan Hukum	39
Tabel 22 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum	39
Tabel 23 Jumlah Pengunjung.....	40
Tabel 24 Data Produk Hukum yang dibahas dan dikaji.....	40
Tabel 25 Data Laporan Komunikasi maupun Informasi	41
Tabel 26 Kajian Permasalahan Hukum dan HAM.....	43
Tabel 27 Daftar Jumlah Notaris di Wilayah Sulawesi Selatan.....	43
Tabel 28 Data Notaris.....	44
Tabel 29 Pelantikan Notaris	44



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kantor Wilayah Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah merupakan perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan HAM yang mengemban tugas di bidang pembangunan Hukum dituntut untuk mampu mengadakan pembaharuan dibidang Hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengemban amanah tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan membangun kerjasama dan koordinasi secara Internal dan Eksternal di bidang Pemasarakatan, di bidang Keimigrasian, di bidang Administrasi Hukum Umum, dan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan di bidang Hukum lainnya.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan terwujudnya pelayanan dan kepastian hukum sesuai dengan slogan PASTI REWAKI. Dimana Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, merupakan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Responsif (mewakili bidang AHU), Empati (mewakili bidang HAM), Wibawa (mewakili bidang Keimigrasian), Aktif (mewakili bidang Pemasarakatan), Komunikatif (mewakili bidang Administrasi), dan Implementatif (mewakili bidang Hukum) merupakan Motto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Tuntutan pelayanan di bidang Hukum yang baik tersebut memerlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan didukung dengan sarana dan prasarana, serta ketersediaan Anggaran yang memadai, sehingga diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan pelaksanaan tugas Triwulan II Tahun 2019 ini adalah sebagai bahan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi administratif maupun teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama periode bulan April s.d. Juni 2019.



2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai pedoman dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode akan datang, sehingga setiap permasalahan dan kendala yang ditemui dan dijabarkan pada laporan ini dapat diatasi dan dicegah sebelumnya, sehingga tidak menghambat dan mengganggu jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ke depannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan laporan ini adalah seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi baik administratif fasilitatif maupun teknis substantif pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dari seluruh divisi yang ada selama periode bulan April s.d. Juni tahun 2019.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.PR.01.03 tahun 2018 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.



BAB II PELAKSANAAN TUGAS

A. DIVISI ADMINISTRASI

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Berikut kegiatan yang dilaksanakan Subbagian Program dan Pelaporan selama Triwulan II Tahun 2019:

Tabel 1 Kegiatan Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan UPT	13-15 Juni 2019
2	Supervisi Pagu Indikatif TA 2020	17-18 Juni 2019

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

Tabel 2 Kegiatan Peliputan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Priyadi beserta jajaran mengikuti kegiatan kuliah umum bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly terkait wawasan kebangsaan di Aula Kanwil	1 April 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
2	Usai kegiatan kuliah umum tentang wawasan kebangsaan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Video Confrence, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hkum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi bersama Kepala Divisi Kanwil memberikan pengarahan kepada seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai Kanwil di Aula Kanwil	1 April 2019
3	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi hadir Rapat Harmonisasi dan Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.	1 April 2019
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi pimpin apel pagi di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Makassar sekaligus mengukuhkan duta informasi dan layanan serta pengawas internal.	4 April 2019
5	Usai mengukuhkan Duta Informasi, Piket Layanan dan Pengawas internal pada Apel Pagi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi tinjau alur layanan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	4 April 2019
6	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiqurrakhman pimpin apel dan memberikan pengarahan kepada semua pegawai agar tetap menjaga disiplin sehingga dapat tercipta kolaborasi dan sinergitas dapat bekerja.	8 April 2019
7	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Priyadi mengajak seluruh staf untuk bekerja secara bersama untuk mengejar pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.	9 April 2019
8	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan lakukan kunjungan kerja di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, untuk melakukan pengecekan sejauh mana persiapan Bapas Makassar dalam melakukan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	9 April 2019
9	Pertemuan Rutin dan Silaturahmi Keluarga Besar Wanita Pengayoman Wilayah Makassar dan sekitarnya dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel,	11 April 2019
10	Kepala Divisi Administrasi (Kadiv Min) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Abdul Rahman L. Kepala Divisi Administrasi selaku Pembina apel menyampaikan agar disiplin terhadap atribut harus terus ditingkatkan.	15 April 2019
11	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan pemantauan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pare Pare	11 April 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
12	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi yang mendampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu dalam melakukan pemantauan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanim Pare-pare	11 April 2019
13	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Parepare, gelar rapat koordinasi kriteria Kabupaten/Kota peduli HAM di Aula Kantor Walikota Parepare	11 April 2019
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi yang mendampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu dalam melakukan pemantauan percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rutan Pinrang	11 April 2019
15	Tim Yankomas dipimpin langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid Batubara, SH,MH yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul-Sel melakukan peninjauan lokasi objek sengketa batas tanah yang diadakan penyampai Komunikasi yakni Para Ahli Waris Mohammad Aslam (alm) di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar.	15 April 2019
16	Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sul Sel Taufiqurrakhman melakukan diskusi dengan JFT PK di ruang kerjanya, pertemuan untuk memberikan penguatan kepada Jft Pk dan merupakan tindak lanjut dari arahan Kakanwil Kemenkumham Sulsel untuk merumuskan tugas - tugas JFT PK yang ada di Kanwil.	16 April 2019
17	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi tinjau persiapan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar untuk pelaksanaan pemilu. Selasa(16/04)	16 April 2019
18	Kadiv Pas Pantau Pelaksanaan Pemilu Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa & Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.	17 April 2019
2019	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Pantau Pelaksanaan Pemilu Lapas Kelas I Makassar, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa & Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.	17 April 2019
20	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Amru Walid Batubara pimpin Apel Pagi	22 April 2019
21	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Hukum, Andi Haris beserta tim lakukan fasilitasi pembentukan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar yang di rangkai dengan kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan Perda/Ranperda	22 April 2019
22	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi kumpulkan bagian program dan humas dalam rangka memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi di ruang rapat pimpinan	22 April 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
23	Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag PH), John Batara Manikallo mengumpulkan seluruh jajaran Humas, Reformatasi Birokrasi dan TI untuk menyatukan pandangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan SKP dan uraian tugas yang telah dibuat, di ruang kerja Kabag PH,	23 April 2019
24	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi lantik dan mengambil sumpah jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Parepare, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Anggota Teknis Hukum pada Kantor BHP Makassar di Hotel Swiss Bellin Makassar	23 April 2019
25	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi buka kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia di Hotel Swiss-Bell Hotel Makassar	23 April 2019
26	Kepala Kantor Wilayah, Priyadi lakukan pertemuan dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pembimbing Kemasyarakatan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel	24 April 2019
27	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi bersama jajaran gelar rapat evaluasi terhadap target kinerja dan action plan Kanwil Sulsel, di ruang rapat pimpinan	24 April 2019
28	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengumpulkan seluruh kepala Divisi dan pejabat struktural di ruang rapat pimpinan, guna melakukan optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan program dan anggaran pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	24 April 2019
29	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi menggelar rapat bersama Tim Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Kakanwil	24 April 2019
30	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan program diskusi hukum teknis terkait penerapan peraturan baru pada layanan persetujuan mempekerjakan advokat asing dan layanan penerjemah tersumpah.	25 April 2019
31	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi Tandatangani MOU dengan Dinas Pendidikan Pemprov Sul Sel di Baruga Pattingaloang Rumah Jabatan Gubernur Prov Sul Sel	2 Mei 2019
32	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi membuka Kegiatan Seminar Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi kalangan Universitas, Industri, dan usaha Kecil Menengah di hotel Melia Makassar	2 Mei 2019
33	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel Taufiqurrakhman membuka Kegiatan Program rehabilitasi Sosial Narkotika Berbasis Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Sungguminasa	2 Mei 2019
34	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengadakan Kegiatan tausiah yang dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai lingkup Kanwil di Aula Kanwil	4 Mei 2019
35	Kepala Divisi imigrasi, Kaharuddin pimpin Apel pagi di awal ramadhan	6 Mei 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
36	Tim Penilai Internal Inspektorat Wilayah I yang diketuai Andreyanto melakukan penilaian faktor hasil dengan melakukan survey eksternal terkait persiapan beberapa satuan kerja menuju WBK/ WBBM	6 Mei 2019
37	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi adakan Rapat dengan perancang Peraturan perundang-Undangan Kanwil Sul Sel di ruang rapat pimpinan	7 Mei 2019
38	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi hadir Silaturahmi Kebangsaan bersama TNI-Polri, Partai politik, ASN, dan Masyarakat yang dirangkaikan dzikir, doa dan buka puasa bersama yang digelar Kementerian Pertahanan RI Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama dengan Pemerintah kota di Karebosi Link Makassar	7 Mei 2019
39	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi terima Kunjungan Tim Penilai Internal dari Inspektorat jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Penguatan Satuan Kerja Prioritas Stranas Pemberantasan Korupsi Kemenkum HAM di Wil Sulawesi Selatan	8 Mei 2019
40	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi bersama Jajaran JFT Perancang Peraturan perundang Undangan Kanwil Memenuhi Undangan DPRD Provinsi Sul Sel membahas Ekspose Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Ekspose Ranperda tentang Bantuan Keuangan Desa	8 Mei 2019
41	Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti Pelaksanaan Teleconfrence melalui Aplikasi Zoom di Ruang Divisi Pemasarakatan	8 Mei 2019
42	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan gelar Buka Puasa Bersama di Aula Kantor Wilayah	8 Mei 2019
43	Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI adakan Evaluasi Indikator Hasil berupa Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone	8 Mei 2019
44	Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan laksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar	9 Mei 2019
45	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi pimpin Rapat dengan Tim Kerja yang telah dibentuk untuk melakukan Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Kanwil	9 Mei 2019
46	Menindak lanjuti surat Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan Pengawasan Orang Asing, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi Kaharuddin pimpin Rapat dengan Jajaran Keimigrasian Kanwil di ruang rapat pimpinan	9 Mei 2019
47	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi lakukan Kunjungan Kerja di Kantor Imigrasi Kelas III Palopo	10 Mei 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
48	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan hukum dan HAM, Amru Walid Batubara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Moh. Yani serta Jajaran Ka. UPT Palopo sambangi Kantor Walikota Palopo perkuat Sinergitas dan Kolaborasi bangun Kota Palopo	10 Mei 2019
49	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi melakukan Kunjungan Kerja di Bapas Palopo yaitu melakukan Pengecekan di semua ruangan	10 Mei 2019
50	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi didampingi kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama Kepala Divisi Administrasi memberikan Pengarahan dan melakukan pemantauan beberapa Fasilitas Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Palopo	10 Mei 2019
51	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi beri Pengarahan terkait Tugas dan Fungsi Notaris di Kabupaten Palopo	10 Mei 2019
52	Direktur Pembimbingan Narapidana dan Pelatihan Kerja dan Produksi, Yunaidi, Bc., IP.,S.H.,M.H. sambangi Lapas Kelas I Makassar selaku Mentor bagi Lapas Makassar dalam Penyelenggaraan Stranas PK	11 Mei 2019
53	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan laksanakan Safari Ramadhan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	11 Mei 2019
54	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Selenggarakan Workshop Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, dengan tema "Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM)	11 Mei 2019
55	Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terima Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam rangka konsultasi terkait Pedoman Penyusunan Peraturan Desa di ruang rapat Kadiv Yankum	14 Mei 2019
56	Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel mengikuti Teleconference bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Aula Kanwil	14 Mei 2019
57	Tim Peneliti dari badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI didampingi Tim dari Kanwil lakukan Penelitian dan Pengkajian Karakteristik Narapidana Kasus Narkoba di Rutan kelas I Makassar	14 Mei 2019
58	Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengadakan Rapat dalam Kantor membahas Ranperda Kota Makassar dengan menggunakan Parameter HAM sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2012 di ruang rapat pimpinan	14 Mei 2019
59	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melakukan Safari Ramadhan di Rutan Kelas I Makassar	14 Mei 2019
60	Tim Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI didampingi Tim dari Kanwil lakukan Penelitian dan Pengkajian Karakteristik Narapidana Kasus Narkoba di LPKA Pare-pare	15 Mei 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
61	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid Batu Bara Pimpin Rapat Persiapan Jelang Kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan di ruang rapat pimpinan Kanwil.	15 Mei 2019
62	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel, Taufiqurrahkman menjadi Narasumber pada acara silaturahmi dan dialog Wawasan Kebangsaan bersama Mitra Subdit Bina Masyarakat di Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Sub Bina Masyarakat Direktorat Deradikilasi Badan Penanggulangan Terorisme yang bertempat di Hotel Gammara Makassar	16 Mei 2019
63	Tim Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI lakukan Pengumpulan Data Karakteristik yang didampingi Tim dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Lapas Kelas IIA Narkotika	16 Mei 2019
64	Kepala Divisi Pelayanan Hukum pimpin Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di ruang Rapat Pimpinan	19 Mei 2019
65	Tim Sekretariat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel memeriksa Kelengkapan Berkas Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari masing-masing 6 Area perubahan	20 Mei 2019
66	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel Taufiqurrahkman mengikuti Rapat Pembahasan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan seluruh Kadivpas	20 Mei 2019
67	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel Taufiqurrahkman mengikuti Rapat Pembahasan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan	20 Mei 2019
68	Kepala Kantor Wilayah memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-111 Tahun 2019 bertempat di lapangan upacara Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.	20 Mei 2019
69	Kakanwil melakukan evaluasi data dukung komponen pengungkit di Lapas Makassar, selain itu juga memberikan arahan dan penguatan kepada tim kerja Kantor Wilayah terkait pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	20 Mei 2019
70	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi oleh para Kadiv buka kegiatan Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan II Tahun 2019 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 di Aula Kantor Wilayah	21 Mei 2019
71	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi oleh Kadiv Imigrasi, Kaharuddin dan Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Rivandhi Rivai terima tamu dari jajaran Ditjen Imigrasi di ruangan Kepala Kantor Wilayah	21 Mei 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
72	Kanwil Kemenkumham Sulsel mengikuti Evaluasi Komponen Pengungkit Satker Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	22 Mei 2019
73	Kanwil kemenkumham sulseel adakan rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara di ruang rapat Kabid Hukum. Diikuti oleh kepala sub bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Tim Perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel	22 Mei 2019
74	kanwil kemenkumham sulseel adakan rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara di ruang rapat Kabid Hukum. Diikuti oleh kepala sub bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Tim Perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel	23 Mei 2019
75	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadiv Yankumham), Amru Walid Batubara menegaskan bahwa untuk membangun Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan memerlukan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel. Hal ini ia sampaikan pada saat memimpin apel	24 Mei 2019
76	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi serahkan penghargaan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Maros atas prestasinya dalam pelaksanaan tugas di Rutan Kelas IIB Pangkep	25 Mei 2019
77	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyempatkan diri mengamati area sekitar yang ada di Rutan Pangkep	25 Mei 2019
78	Komunikasi antara Kepala Unit Pelaksana Teknis (KaUPT) dengan Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulseel) belum terbangun dengan baik. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi saat melakukan briefing dengan KaUPT usai pelaksanaan Safari ramadhan di Lapas Pangkajene	25 Mei 2019
79	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi lakukan safari ramadhan di Balai Harta Peninggalan Makassar,	26 Mei 2019
80	Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meresmikan Mushollah Al Munawwarah Balai Harta Peninggalan (BHP)	26 Mei 2019
81	Masalah penyerapan anggaran di lingkungan satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menjadi prioritas Kepala Kantor Wilayah, Priyadi. Untuk itu, ia mengumpulkan seluruh pejabat eselon III dan kasubag program dan pelaporan untuk melakukan evaluasi penyerapan anggaran lingkup Kanwil Sulseel, di ruang rapat pimpinan.	27 Mei 2019
82	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Kaharuddin dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare beri penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada ASN Kanim Parepare di Aula,	27 Mei 2019
83	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Kaharuddin dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare beri penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada ASN Kanim Parepare di Aula,	27 Mei 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
84	kanwil kemenkumham sulsel adakan rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara di ruang rapat Kabid Hukum. Diikuti oleh kepala sub bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Tim Perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel	28 Mei 2019
85	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Negara(Rutan) Kelas I Makassar	31 Mei 2019
86	Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiqurrakhman melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Takalar dalam rangka penguatan tugas – tugas Pemasarakatan,	31 Mei 2019
87	. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi dengan Kepala Rutan makassar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rumah Tahanan Negara(Rutan) Kelas I Makassar	31 Mei 2019
88	Upacara Peringatan Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Makassar dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bapak Priyadi selaku Inspektur Upacara	1 Juni 2019
89	Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sejumlah institusi di luar Kota Makassar mengikuti Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang di gelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Rutan Kelas I Makassar	1 Juni 2019
90	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi menyampaikan sebanyak 5.100 orang narapidana dari berbagai Lapas dan Rutan di Lingkungan Kanwil kepada Wartawan di Rutan Kelas I Makassar	1 Juni 2019
91	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi pimpin Apel Perdana usai libur Idul Fitri kemudian dilanjutkan dengan Halal Bi Halal dengan seluruh jajaran staf Kanwil di Halaman Kanwil	10 Juni 2019
92	Rapat dengan Para kadiv dan Jajaran Tim reformasi Birokrasi di Ruang Ka Kanwil dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM pada Kanwil dan UPT	10 Juni 2019
93	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi menghadiri undangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar guna memberikan Penguatan Tugas dan Fungsi di Aula Lapas Makassar terkait dengan status Lapas sebagai Mandatori Stranas PK	10 Juni 2019
94	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi Gelar Halal Bi Halal Perkuat Ukhuwah Islamiyah di Rumah Jabatan Ka. Kanwil	10 Juni 2019
95	Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi bersama jajaran Eselon II dan III membahas capaian kinerja triwulan pertama dan triwulan target kinerja triwulan II dalam rangka pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan di Lingkungan Kantor Wilayah	10 Juni 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
96	Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama jajaran Eselon II dan III membahas capaian kinerja triwulan pertama dan target kinerja triwulan kedua di ruang Ka. Kanwil	12 Juni 2019
97	Kolaborasi Kanwil Kemenkum HAM Sul el dengan BNNP dalam Pencegahan, Penindakan dan Rehabilitasi Narkoba di ruang Ka. Kanwil	12 Juni 2019
98	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terus berbenah untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pad tahun 2019	13 Juni 2019
99	Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM Sul Sel, Priyadi didampingi oleh para Kepala divisi membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang diadakan oleh Divisi Keimigrasian kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	13 Juni 2019
100	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum an Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi terus perkuat Sinergitas dan solidaritas dengan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Sulawesi Selatan	13 Juni 2019
101	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum an Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi disambut oleh Wakil Bupati Bulukumba, Tommy Satria Yulianto pada acara malam ramah tamah jajaran Muspida Kab. Bulukumba bertempat Hakuna Matata Resort Pantai Tanjung Bira	Bapak bersama di 13 Juni 2019
102	Monitoring indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang, oleh Tim Kolaborasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	14 Juni 2019
103	Monitoring Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale, oleh Tim Kolaborasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	14 Juni 2019
104	Monitoring Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Pagu Indikatif Tahun 2020, RKT Reformasi Birokrasi, dan Monitoring Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng, oleh Tim Kolaborasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	14 Juni 2019
105	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Selayar	14 Juni 2019
106	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait Pembentukan Peraturan Daerah dan Harmonisasi Peraturan Daerah	14 Juni 2019
107	Monev IKPA Laporan Monitoring dan Evaluasi Kolaborasi tentang Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan serta capaian IKPA oleh Tim Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	14 Juni 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
108	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi bersama rombongan melakukan Kunjungan Kerja tinjau Pelayanan Publik Berbasis HAM di Rutan Bantaeng	15 Juni 2019
109	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi Kadiv Yankum dan Kadiv Administrasi lakukan Pemantauan progres Pembangunan Rutan Kelas IIB Jeneponto yang baru dan Ka. Kanwil berharap Tingkatkan Penyerapan Anggaran di jalan lingkaran kelurahan empang selatan	15 Juni 2019
110	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi pimpin Rapat membahas persiapan dan kesiapan Kantor Wilayah dalam menyambut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan di Rumah Dinas Ka. Kanwil	16 Juni 2019
111	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi lakukan pemeriksaan Kelengkapan Seragam Dinas dan akan membentuk Tim Kepatuhan Internal yang bertanggung jawab untuk Pengendalian Internal di Halaman Kanwil	17 Juni 2019
112	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi pimpin Rapat Koordinasi membahas kesiapan dan persiapan dalam menyambut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh Perwakilan dari Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi & Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel	17 Juni 2019
113	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi didampingi dengan Kabag Program dan Humas, John Batara dan Kasub. Bag PP, Utary Sukmawati terima Kunjungan Kerja dari Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Febri Mujiyono beserta jajarannya di ruang kerja Ka. Kanwil	17 Juni 2019
114	Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, mengikuti Teleconference Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM T.A. 2018 bertempat di Aula Kanwil	17 Juni 2019
115	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan adakan Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM dan dibuka oleh Ka. Kanwil Priyadi dengan didampingi oleh Para Kadiv	17 Juni 2019
116	Pembahasan RUU Pemasarakatan antara Jajaran Kemenkum HAM Sul Sel dengan Jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengadilan Tinggi dengan Komisi DPR RI di Hotel Rinra Makassar	18 Juni 2019
117	Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Abu Bakar beserta rombongan bersama Ka. Kanwil Kemenkum HAM Sul Sel usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sul Sel dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Pemasarakatan	18 Juni 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
118	Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan menggelar pertemuan rutin yang diselenggarakan di Aula Kanwil Sulsel	18 Juni 2019
119	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM tahun 2019 di Aula Kanwil	20 Juni 2019
120	Dalam rangka meningkatkan disiplin bagi pegawai Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, Abd. Rahman L melakukan pemeriksaan atribut dan kelengkapan seragam	24 Juni 2019
121	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan. Termasuk diantaranya, tersedianya ruang bermain anak, tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas, tempat parkir khusus disabilitas, dan alat bantu kelompok rentan	24 Juni 2019
122	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama pada Kepala Divisi mengikuti <i>teleconference</i> bersama Sekretariat Jenderal dan para kepala Biro di Aula Kanwil	24 Juni 2019
123	Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adakan sosialisasi terkait dengan gratifikasi di Aula Lapas Kelas I Makassar	24 Juni 2019
124	Menindaklanjuti hasil <i>teleconference</i> dengan Sekjen dan para Kepala Biro Kemenkumham tadi pagi dalam pembahasan persiapan rakor tanggal 1-3 Juli 2019 mendatang, Kepala Kantor Wilayah bersama para Kepala Divisi mengumpulkan para pejabat administrator untuk membahas hasil <i>teleconference</i> tersebut di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil	24 Juni 2019
125	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	25 Juni 2019
126	Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adakan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	25 Juni 2019
	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi bersama engan para Kepala Divisi, para BPP dan pejabat administrator adakan pertemuan di ruang rapat pimpinan membahas optimasiasi anggaran	25 Juni 2019
	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, John Batara bertemu dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan di ruang kerja Kepala ombudsman	26 Juni 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU
	Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiqurakhman mewakili Kakanwil menghadiri acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2019 yang dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	26 Juni 2019
	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan gelar kegiatan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian Tahun Anggaran 2019 di Aula Kanwil Sulsel	26 Juli 2019
	Pembukaan kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah bertempat di Hotel Citadines Makassar	26 Juli 2019
	Arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Priyadi sekaligus memberikan pemahaman mendasar kepada para peserta kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan	26 Juli 2019



NO	KEGIATAN	WAKTU

Sumber : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 3 Penyelenggaraan Kehumasan

NO.	KEGIATAN
1	Pembuatan Spanduk, Banner dan Media Informasi Lain terkait Kegiatan dan Program yang ada pada Kantor Wilayah
2	Peliputan dan Publikasi Berita terkait Kegiatan Kantor Wilayah

Sumber : Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Adapun keadaan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan disampaikan pada tabel berikut:



Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I										
1	Kanwil	25	119	30	-	-	-	34	-	-	7	92	41	-	174
2	LP Makassar	9	74	64	-	-	-	77	-	-	9	55	6	-	147
3	LP Watampone	4	62	51	-	-	-	75	-	-	2	29	11	-	117
4	LP Pare-pare	3	27	38	-	-	-	44	-	-	-	19	5	-	68
5	LP Bulukumba	3	52	33	-	-	-	44	-	-	2	40	2	-	88
6	LP Narkotika	3	48	74	-	-	-	74	-	-	5	41	5	-	125
7	LP Maros	3	39	42	-	-	-	46	-	-	2	30	6	-	84
8	LP Palopo	2	41	41	-	-	-	56	-	-	3	23	2	-	84
9	Bapas Makassar	11	65	6	-	-	-	6	-	-	2	58	16	-	82
10	Bapas Watampone	2	43	11	-	-	-	17	-	-	-	36	3	-	56
11	Bapas Palopo	1	17	2	-	-	-	5	-	-	-	14	1	-	20
12	Rutan Makassar	6	97	77	-	-	-	96	-	-	2	73	9	-	180
13	Rutan Barru	2	19	21	-	-	-	21	-	-	-	18	3	-	42
14	Rutan Enrekang	-	20	16	-	-	-	25	-	-	1	8	2	-	36
15	Rutan Makale	1	17	18	-	-	-	28	-	-	-	7	1	-	36
16	Rutan Pangkajene	-	31	23	-	-	-	32	-	-	-	21	1	-	54
17	Rutan Pinrang	1	19	33	-	-	-	37	-	-	-	13	3	-	53
18	Rutan Sidrap	2	22	24	-	-	-	29	-	-	1	16	2	-	48
19	Rutan Watansoppeng	-	20	15	-	-	-	20	-	-	-	13	2	-	35
20	Rutan Jeneponto	1	26	20	-	-	-	29	-	-	-	15	3	-	47
21	Rutan Bantaeng	1	21	15	-	-	-	24	-	-	1	10	2	-	37
22	Rutan Selayar	-	25	27	1	-	-	37	-	-	1	15	-	-	53
23	Rutan Sinjai	-	28	17	-	-	-	28	1	-	-	13	3	-	45
24	Rutan Sengkang	1	24	27	-	-	-	29	-	-	-	19	4	-	52
25	Rutan Malino	1	12	9	-	-	-	11	-	-	1	8	2	-	22
26	Rutan Masamba	1	15	31	-	-	-	36	-	-	1	8	2	-	47
27	Rupbasan Makassar	1	22	13	-	-	-	15	-	-	1	15	5	-	36



NO	UNIT/SATKER	JUMLAH PEGAWAI				TINGKAT PENDIDIKAN									JML
		GOLONGAN				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
		IV	III	II	I										
28	Kanim Makassar	3	91	12	-	-	-	13	-	-	6	73	12	2	106
29	Rudenim Makassar	1	16	35	-	-	-	35	-	-	1	11	5	-	52
30	BHP Makassar	6	22	3	-	-	-	5	-	-	1	15	10	-	31
31	Lapas Takalar	4	47	44	-	-	-	50	-	-	1	39	5	-	95
32	Lapas Wanita Sungguminasa	-	25	57	-	-	-	63	-	-	1	14	4	-	82
33	Kanim Parepare	-	40	5	-	-	-	8	-	-	3	32	2	-	45
34	Kanim Palopo	-	30	4	-	-	-	1	-	-	-	30	3	-	34
TOTAL		98	1276	938	1	0	0	1150	1	0	54	923	183	2	2313

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG
		I		II		III		IV		V		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kanwil Sulawesi Selatan	-	-	1	4	7	-	18	-	-	-	-
2	LP Makassar	-	-	-	1	-	1	-	9	-	-	2
3	Bapas Makassar	-	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3
4	Rutan Makassar	-	-	-	-	-	1	-	3	6	-	-
5	Rutan Masamba	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
6	Rudenim Makassar	-	-	-	-	1	-	-	4	9	-	-
7	Rutan Sidrap Rappang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
8	LP Takalar	-	-	-	-	-	1	-	3	6	-	2
9	Rutan Sinjai	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
10	Bapas Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
11	LP Maros	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
12	Rutan Sengkang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
13	LP Wanita Sungguminasa	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	2
14	Rutan Pangkajene	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
15	Rutan Pinrang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
16	Rutan Enrekang	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
17	LP Bulukumba	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
18	LP Watampone	-	-	-	-	1	-	4	-	8	-	1
19	LP Anak Parepare	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	1
20	Rutan Selayar	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
21	Rutan Jeneponto	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
22	LP Palopo	-	-	-	-	1	-	5	-	8	-	-
23	Rutan Watansopeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
24	Rutan Makale	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
25	Rupbasan Makassar	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-



1	UNIT/SATKER	PEJABAT ESELON										JABATAN KOSONG
		I		II		III		IV		V		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
26	LP Narkotika Sungguminasa	-	-	-	-	1	-	5	-	7	-	-
27	Bapas Watampone	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
28	Rutan Bantaeng	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
29	Rutan Malino	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
30	Rutan Barru	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
31	BHP Makssar	-	-	-	-	1	6	4	-	3	-	-
32	Kanim Makassar	-	-	-	-	1	-	5	-	10	-	-
33	Kanim Parepare	-	-	-	-	-	1	-	4	9	-	-
34	Kanim Palopo	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
TOTAL		0	0	1	5	16	15	73	26	159	-	15

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanwil	100	57	74	43	174
2	LP Makassar	119	81	28	19	147
3	LP Watampone	95	81	22	19	117
4	LP Pare-pare	55	81	13	19	68
5	LP Bulukumba	77	88	11	13	88
6	LP Narkotika	113	90	12	10	125
7	LP Maros	73	87	11	13	84
8	LP Palopo	79	94	5	6	84
9	Bapas Makassar	55	67	27	33	82
10	Bapas Watampone	41	73	15	27	56
11	Bapas Palopo	13	65	7	35	20



NO	UNIT/SATKER	JENIS KELAMIN				JML
		P	%	W	%	
1	2	3	4	5	6	7
12	Rutan Makassar	142	79	38	21	180
13	Rutan Barru	37	88	5	12	42
14	Rutan Enrekang	31	86	5	14	36
15	Rutan Makale	31	86	5	14	36
16	Rutan Pangkajene	46	85	8	15	54
17	Rutan Pinrang	46	86	7	13	53
18	Rutan Sidrap	43	90	5	10	48
19	Rutan Watansoppeng	29	83	6	17	35
20	Rutan Jeneponto	38	81	9	19	47
21	Rutan Bantaeng	33	89	4	11	37
22	Rutan Selayar	43	81	10	19	53
23	Rutan Sinjai	40	89	5	11	45
24	Rutan Sengkang	44	85	8	15	52
25	Rutan Malino	19	86	3	14	22
26	Rutan Masamba	39	83	8	17	47
27	Rupbasan Makassar	25	69	11	31	36
28	Kanim Makassar	60	57	46	43	106
29	Rudenim Makassar	40	77	12	23	52
30	BHP Makassar	16	52	15	48	31
31	Lapas Takalar	84	88	11	12	95
32	Lapas Wanita Sungguminasa	25	30	57	70	82
33	Kanim Parepare	33	73	12	27	45
34	Kanim Palopo	31	91	3	9	34
JUMLAH		1795	78	518	22	2313

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Formasi

Formasi adalah penentu jumlah dan susunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, kerap ditemukan berbagai kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sehingga



dibutuhkan penambahan jumlah pegawai melalui pelaksanaan penerimaan ASN. Adapun kebutuhan pegawai sesuai dengan tabel 7:

Tabel 7 Jumlah Kebutuhan Pegawai

NO	UPT/ SATKER	KEBUTUHAN PEGAWAI	PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN PEGAWAI
1	Kanwil	184	174	10
2	LP Makassar	174	147	27
3	LP Watampone	137	117	20
4	LP Pare-pare	160	68	92
5	LP Bulukumba	113	88	25
6	LP Narkotika	175	125	50
7	LP Maros	134	84	50
8	LP Palopo	150	84	66
9	Bapas Makassar	102	82	20
10	Bapas Watampone	60	56	4
11	Bapas Palopo	50	20	30
12	Rutan Makassar	220	180	40
13	Rutan Barru	67	42	25
14	Rutan Enrekang	56	36	20
15	Rutan Makale	51	36	15
16	Rutan Pangkajene	70	54	16
17	Rutan Pinrang	73	53	20
18	Rutan Sidrap	73	48	25
19	Rutan Watansoppeng	60	35	25
20	Rutan Jeneponto	62	47	15
21	Rutan Bantaeng	46	37	9
22	Rutan Selayar	60	53	7
23	Rutan Sinjai	70	45	25
24	Rutan Sengkang	122	52	70
25	Rutan Malino	45	22	23
26	Rutan Masamba	77	47	30
27	Rupbasan Makassar	36	36	0
28	Kanim Makassar	123	106	17
29	Rudenim Makassar	75	52	23
30	BHP Makassar	45	31	14
31	Lapas Takalar	100	95	5
32	Lapas Wanita Sungguminasa	102	82	20
33	Kanim Parepare	55	45	10
34	Kanim Palopo	39	34	5
Total		3091	2313	778



Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Kantor Wilayah melalui subbbagian kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga sebagai perantara antara BPSDM Hukum dan HAM maupun Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan peserta diklat. Adapun data pegawai dalam lingkungan kantor wilayah yang mengikuti diklat selama Triwulan I dan Triwulan II tahun 2019 adalah :

Tabel 8 Pegawai yang Mengikuti Diklat

No	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	PESERTA	WAKTU	LOKASI
1	Diklat Bendaharawan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3 Orang	07 Juli s/d 12 Juli 2019	Hotel Mels In Manado
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Kepala Regu	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	22 April s/d 28 April 2019	Balai Diklat Agama Manado
3	Pelatihan Teknis Pengamanan Penjaga Pintu Utama	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	22 April s/d 28 April 2019	Balai Diklat Agama Manado
4	Pendidikan dan Pelatihan PPNS	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	11 Maret s/d 10 Mei 2019	Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Megamendung, Bogor
5	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	28 Februari s/d 26 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
6	Diklat Terpadu SPPA	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	13 Maret s/d 28 Maret 2019	Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta
7	Pelatihan Teknis Pengamanan Penjaga Pintu Utama	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3 Orang	20 Maret s/d 26 Maret 2019	Hotel Gran Central Manado
8	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	17 Juni s/d 06 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
9	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	08 Juli s/d 27 Juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
10	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	2 Orang	08 Juli s/d 25 Oktober 2019	BPSDM Hukum dan HAM
11	Diklat Terpadu SPPA	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	18 Juni s/d 03 juli 2019	Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta
12	Pelatihan Kepemimpinan Tk. III	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	11 April s/d 30 juli 2019	BPSDM Hukum dan HAM
13	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	08 April s/d 09 Agustus 2019	BPSDM Hukum dan HAM
14	Pendidikan dan Pelatihan PPNS	BPSDM Hukum dan HAM	1 Orang	01 Juli s/d 30 Agustus 2019	Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Megamendung, Bogor

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



Sementara untuk pengadaan diklat dengan metode *e-learning* adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Pegawai yang mengikuti Diklat dengan metode *e-learning*

No	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA	PESERTA	LOKASI
1	Reformasi Birokrasi	BPSDM Hukum dan HAM	254 Orang	Masing-masing UPT
2	Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	BPSDM Hukum dan HAM	254 Orang	Masing-masing UPT
3	Muatan Teknis Substansi Lembaga	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	Masing-masing UPT
4	Dasar-dasar HAM	BPSDM Hukum dan HAM	7 Orang	Masing-masing UPT
5	Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	Balai Pelatihan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	4 Orang	Masing-masing UPT

Sumber : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

3. Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sudah terlaksana dengan baik. Adapun Realisasi Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan hingga Triwulan II (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan, diuraikan dalam tabel 8 dan 8.1 sebagai berikut :



Tabel 10 Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II (Januari s.d. Juni) Tahun 2019

No.	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				(a)	(b)	(c) = (b) : (a)	(d)		(f) = (e) : (d)	(g)	(h)	(i) = (h) : (g)	(j) = (a) + (d) + (g)	(k) = (b) + (e) + (h)	(l) = (k) : (j)
1	01	408773	Kanwil Sulawesi Selatan (SEKJEN)	10,085,571,000	7,077,809,000	70.18	5,063,224,000	2,378,720,135	46.98			0.00	15,148,795,000	9,456,529,135	62.42
SUB TOTAL (01)				10,085,571,000	7,077,809,000	70.18	5,063,224,000	2,378,720,135	46.98	-	-	0.00	15,148,795,000	9,456,529,135	62.42
2	03	408772	Kanwil Sulawesi Selatan (AHU)	-	-	0.00	3,500,000,000	1,427,053,805	40.77	-	-	0.00	3,500,000,000	1,427,053,805	40.77
3	03	408432	BHP Makassar	1,727,074,000	1,216,167,651	70.42	2,231,258,000	1,086,500,294	48.69	64,000,000	64,000,000	100.00	4,022,332,000	2,366,667,945	58.84
SUB TOTAL (03)				1,727,074,000	1,216,167,651	70.42	5,731,258,000	2,513,554,099	43.86	64,000,000	64,000,000	100.00	7,522,332,000	3,793,721,750	50.43
4	05	408774	Kanwil Sulawesi Selatan (PAS)	-	-	0.00	874,552,000	651,271,141	74.47			0.00	874,552,000	651,271,141	74.47
5	05	407072	Bapas Makassar	3,136,409,000	3,112,235,061	99.23	1,032,770,000	506,142,840	49.01			0.00	4,169,179,000	3,618,377,901	86.79
6	05	109144	Bapas Watampone	2,665,912,000	1,984,419,494	74.44	905,446,000	400,121,102	44.19			0.00	3,571,358,000	2,384,540,596	66.77
7	05	407081	LP Makassar	7,008,850,000	5,537,030,031	79.00	9,028,606,000	4,500,963,357	49.85			0.00	16,037,456,000	10,037,993,388	62.59
8	05	407097	Rutan Pangkajene	2,436,189,000	2,023,918,796	83.08	2,804,291,000	1,718,483,373	61.28			0.00	5,240,480,000	3,742,402,169	71.41



No.	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
9	05	407101	LP Maros	4,077,887,000	3,071,567,262	75.32	3,388,223,000	2,402,438,239	70.91			0.00	7,466,110,000	5,474,005,501	73.32
10	05	407117	LP Takalar	4,241,798,000	3,450,414,799	81.34	4,353,813,000	2,571,809,416	59.07			0.00	8,595,611,000	6,022,224,215	70.06
11	05	407123	Rutan Jenepono	2,599,643,000	1,878,897,298	72.28	1,407,163,000	724,219,678	51.47	18,757,649,000	647,947,775	3.45	22,764,455,000	3,251,064,751	14.28
12	05	407132	Rutan Selayar	2,000,418,000	1,740,138,878	86.99	1,203,309,000	595,533,200	49.49			0.00	3,203,727,000	2,335,672,078	72.90
13	05	407148	Rutan Bantaeng	2,006,161,000	1,431,023,399	71.33	1,803,459,000	913,683,309	50.66			0.00	3,809,620,000	2,344,706,708	61.55
14	05	407154	LP Bulukumba	5,474,783,000	3,585,592,744	65.49	3,485,946,000	1,908,633,723	54.75			0.00	8,960,729,000	5,494,226,467	61.31
15	05	407163	Rutan Malino	1,180,506,000	806,721,820	68.34	1,099,357,000	493,777,113	44.92			0.00	2,279,863,000	1,300,498,933	57.04
16	05	407179	Rutan Sinjai	3,058,691,000	1,850,734,394	60.51	1,846,242,000	1,043,149,667	56.50			0.00	4,904,933,000	2,893,884,061	59.00
17	05	407185	LP Palopo	4,386,030,000	3,100,643,105	70.69	6,466,857,000	3,720,576,578	57.53			0.00	10,852,887,000	6,821,219,683	62.85
18	05	407191	Rutan Makale	2,216,062,000	1,253,979,582	56.59	1,625,933,000	929,725,891	57.18			0.00	3,841,995,000	2,183,705,473	56.84
19	05	407205	Rutan Masamba	2,486,630,000	1,618,174,858	65.08	3,423,216,000	1,764,656,336	51.55			0.00	5,909,846,000	3,382,831,194	57.24
20	05	407211	LP Anak Pare-Pare	3,637,279,000	2,546,701,857	70.02	5,276,580,000	2,907,765,139	55.11			0.00	8,913,859,000	5,454,466,996	61.19



No.	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
21	05	407230	Rutan Pinrang	2,382,346,000	1,844,510,510	77.42	4,126,390,000	2,428,721,170	58.86			0.00	6,508,736,000	4,273,231,680	65.65
22	05	407236	Rutan Sidrap Rappang	2,374,476,000	1,719,808,044	72.43	4,144,908,000	2,067,857,303	49.89			0.00	6,519,384,000	3,787,665,347	58.10
23	05	407242	Rutan Enrekang	1,676,081,000	1,385,550,830	82.67	2,221,780,000	1,330,899,048	59.90			0.00	3,897,861,000	2,716,449,878	69.69
24	05	407251	Rutan Barru	2,234,169,000	1,572,657,663	70.39	2,362,839,000	1,417,592,097	60.00			0.00	4,597,008,000	2,990,249,760	65.05
25	05	407302	LP Watampone	6,471,486,000	4,335,881,194	67.00	5,317,380,000	1,981,570,572	37.27			0.00	11,788,866,000	6,317,451,766	53.59
26	05	407318	Rutan Sengkang	2,660,244,000	1,833,355,311	68.92	3,157,987,000	1,797,294,184	56.91			0.00	5,818,231,000	3,630,649,495	62.40
27	05	407324	Rutan Watansoppeng	1,945,126,000	1,328,595,131	68.30	1,785,361,000	829,285,016	46.45			0.00	3,730,487,000	2,157,880,147	57.84
28	05	497821	LP Wanita Sungguminasa	3,953,726,000	2,654,695,030	67.14	2,186,606,000	1,295,725,242	59.26			0.00	6,140,332,000	3,950,420,272	64.34
29	05	526793	Rutan Makassar	9,247,294,000	6,551,267,455	70.85	16,993,230,000	9,048,098,971	53.25			0.00	26,240,524,000	15,599,366,426	59.45
30	05	626122	Rupbasan Makassar	1,702,965,000	1,254,169,303	73.65	421,849,000	233,006,447	55.23			0.00	2,124,814,000	1,487,175,750	69.99
31	05	653044	LP Narkotika Sungguminasa	4,978,673,000	4,120,789,471	82.77	8,041,328,000	4,254,416,214	52.91			0.00	13,020,001,000	8,375,205,685	64.33
32	05	653154	Bapas Palopo	1,111,099,000	803,916,937	72.35	989,936,000	407,817,661	41.20			0.00	2,101,035,000	1,211,734,598	57.67



No.	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
SUB TOTAL (05)				93,350,933,000	68,397,390,257	73.27	101,775,357,000	54,845,234,027	53.89	18,757,649,000	647,947,775	0.00	213,883,939,000	123,890,572,059	57.92
33	06	408775	Kanwil Sulawesi Selatan (IMIGRASI)	-		0.00	967,900,000	447,373,163	46.22	120,100,000	119,317,500	99.35	1,088,000,000	566,690,663	52.09
34	06	408216	Kanim Makassar	5,195,842,000	4,034,818,355	77.65	6,339,714,000	2,017,747,010	31.83	351,539,000		0.00	11,887,095,000	6,052,565,365	50.92
35	06	409001	Kanim Pare-Pare	2,427,005,000	1,677,233,180	69.11	3,750,335,000	1,879,247,340	50.11	753,615,000	41,500,000	5.51	6,930,955,000	3,597,980,520	51.91
36	06	664675	Rudenim Makassar	1,596,623,000	1,520,210,308	95.21	2,641,467,000	1,252,943,005	47.43	3,721,122,000	125,546,000	3.37	7,959,212,000	2,898,699,313	36.42
37	06	418937	Kanim Palopo	1,026,123,000	1,073,366,274	104.60	2,483,200,000	1,542,003,773	62.10	1,132,757,000	784,469,000	69.25	4,642,080,000	3,399,839,047	73.24
SUB TOTAL (06)				10,245,593,000	8,305,628,117	81.07	16,182,616,000	7,139,314,291	44.12	6,079,133,000	1,070,832,500	17.61	32,507,342,000	16,515,774,908	50.81
38	07	408776	Kanwil Sulawesi Selatan (HAKI)			0.00	198,057,000	89,686,250	45.28			0.00	198,057,000	89,686,250	45.28
SUB TOTAL (07)				-	-	0.00	198,057,000	89,686,250	45.28	-	-	0.00	198,057,000	89,686,250	45.28
39	08	408777	Kanwil Sulawesi Selatan (PP)			0.00	158,591,000	34,724,000	21.90			0.00	158,591,000	34,724,000	21.90
SUB TOTAL (08)						0.00	158,591,000	34,724,000	21.90			0.00	158,591,000	34,724,000	21.90



Laporan Triwulan II Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

No.	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA		
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
40	09	408778	Kanwil Sulawesi Selatan (HAM)			0.00	281,828,000	104,565,500	37.10			0.00	281,828,000	104,565,500	37.10
SUB TOTAL (09)				-	-	0.00	281,828,000	104,565,500	37.10	-	-	0.00	281,828,000	104,565,500	37.10
41	10	408779	Kanwil Sulawesi Selatan (BPHN)			0.00	2,430,030,000	176,212,200	7.25				2,430,030,000	176,212,200	7.25
SUB TOTAL (10)				-	-	0.00	2,430,030,000	176,212,200	7.25	-	-	0.00	2,430,030,000	176,212,200	7.25
42	11	408780	Kanwil Sulawesi Selatan (Balitbang HAM)			0.00	40,279,000	22,964,000	57.01			0.00	40,279,000	22,964,000	57.01
SUB TOTAL (11)				-	-	0.00	40,279,000	22,964,000	57.01	-	-	0.00	40,279,000	22,964,000	57.01
TOTAL				115,409,171,000	84,996,995,025	73.65	131,861,240,000	67,304,974,502	51.04	24,900,782,000	1,782,780,275	7.16	272,171,193,000	154,084,749,802	56.61

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



Tabel 11 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	115,409,171,000	84,996,995,025	73.65
2	Belanja Barang	131,861,240,000	67,304,974,502	51.04
3	Belanja Modal	24,900,782,000	1,782,780,275	7.16
TOTAL		272,171,193,000	154,084,749,802	56.61

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

4. Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN)

Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

NO	SEKTOR PNBP	TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET)	TRIWULAN II (APRIL S.D. JUNI)
1.	UPT Keimigrasian	Rp. 9,071,348	Rp. 9.400.410
2.	UPT Pemasarakatan	Rp. 60,377,980	Rp. 129.810.472
3.	BHP	-	-
4.	Kantor Wilayah	Rp. 7.512.000	Rp. 6.284.000
Subtotal Pertriwulan		Rp 76.961.328	Rp 145.494.882
TOTAL		Rp 222.456.210	

Sumber : Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

B. DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasarakatan terdiri atas dua bidang. Yakni Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan,



perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Serta Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

1. Pelayanan Tahanan

Dalam proses pra adjudikasi, seorang tahanan yang didakwa melakukan pelanggaran hukum, diperlakukan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan seorang tahanan harus dipisahkan dengan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Narapidana). Beberapa bangunan Lapas yang ada saat ini, selain berfungsi sebagai tempat pembinaan (LAPAS), juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan (Rutan). Kondisi yang demikian menyebabkan kondisi Lapas melebihi daya tampung (Over Kapasitas) penghuni dan tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Keadaan Jumlah Penghuni NAPI/ Tahanan

Data Napi / Tahanan di Triwulan II Tahun 2019 pada tabel 10 berikut :

Tabel 13 Data Napi/Narapidana pada Satuan Kerja

NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	740	110	0	886	0	996	135	35
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	300	54	18	284	8	364	121	21
3	LAPAS KELAS II A MAROS	202	110	9	491	12	622	308	208
4	LAPAS KELAS II A PALOPO	314	99	24	655	7	785	250	150
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	450	121	21	255	6	403	90	0
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	250	43	12	444	4	503	201	101
7	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA	360	9	0	1010	0	1019	283	183
8	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA	248	0	239	0	4	243	98	0
9	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PARE-PARE	360	80	26	406	7	519	144	44



NO	UPT	KAP	NAPI		TAHANAN		JML NAPI/ TAHANAN	% HUNIAN	% OVER KAPASITAS
			L	P	L	P			
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	1000	1780	29	174	181	2164	216	116
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	62	37	7	111	8	163	263	163
12	RUTAN KELAS II B BARRU	106	22	4	193	4	223	210	110
13	RUTAN KELAS II B ENREKANG	85	16	18	159	2	195	229	129
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	44	85	3	64	4	156	355	255
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	47	74	6	112	7	199	423	323
16	RUTAN KELAS II B MALINO	50	1	0	65	0	66	132	32
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	225	91	11	231	2	335	149	49
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	123	94	9	268	3	374	304	204
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	220	179	22	249	11	461	210	110
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	69	28	6	82	3	119	172	72
21	RUTAN KELAS II B SENGGANG	200	117	13	230	7	367	184	84
22	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG	140	88	10	287	14	399	285	185
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	100	49	2	128	3	182	182	82
24	RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG	62	45	4	117	4	170	274	174
TOTAL		5757	3332	493	6901	301	11027	5219	2830

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasarakan dan Rumah Tahanan Negara , data diolah oleh Divisi Pemasarakan

2. Pembinaan Narapidana

Data Pemberian PB, CB dan CMB pada Lapas/ Rutan se-wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 14 Data Pemberian PB, CB, dan CMB

NO	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP		
		PB	CB	CMB
1	2	3	4	5
1	April	62	5	-
2	Mei	46	14	-



NO	BULAN	PEMBERIAN HAK-HAK WBP		
		PB	CB	CMB
3	Juni	69	41	-
TOTAL		177	60	0

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara , data diolah oleh Divisi Pemasyarakatan

3. Pembinaan Klien

Keadaan klien Pemasyarakatan pada Bapas se-Sulawesi Selatan dirinci berdasarkan klasifikasinya pada tabel berikut:

Tabel 15 Keadaan Klien Pemasyarakatan

NO	SATKER / UPT	KLIEN BAPAS	KLIEN YANG MENDAPATKAN PEMBIMBINGAN	KLIEN YANG MENDAPATKAN PENGAWASAN	KLIEN YANG MENDAPATKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN	%
1	Bapas Makassar	1514	862	10	872	57.60
2	Bapas Watampone	387	159	4	163	42.12
3	Bapas Palopo	1664	531	206	737	44.29

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan , data diolah oleh Divisi Pemasyarakatan

4. Perawatan Basan/ Barang

Untuk kepentingan proses peradilan, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan disita dan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Makassar (Terlampir).

C. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Divisi Keimigrasian terdiri dari dua bidang. Yakni Bidang Intelijen dan Penindakan yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Serta Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Keimigrasian berkoordinasi dengan empat UPT Keimigrasian yang ada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Kantor Imigrasi Kelas III Non



TPI Palopo, dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Adapun pelaksanaan tugas dari Divisi Keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SPRI

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau biasa disebut Paspor adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai dokumen resmi yang harus dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. SPRI terdapat dua jenis, yakni paspor 24 Halaman dan 48 halaman. Adapun jumlah permohonan paspor pada periode Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Pemberian Paspor RI

NO	UNIT PELAKSANA TUGAS	PASPOR	
		24 HALAMAN	48 HALAMAN
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	27	12.319
2.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	120	5.066
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Palopo	-	2.938
JUMLAH		147	20.323

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

2. Pelayanan ITAS/ ITAP

Selain pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri, Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo terkait ijin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun pelayanan yang dilakukan selama Triwulan II Tahun 2019 periode April s.d Juni adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Pelayanan ITAS/ITAP

NO	UNIT/ SATKER	PELAYANAN					KET.
		ITK	ITAS	PERPANJANG ITAS	ITAP	PERPANJANG ITAP	
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	343	254	84	-	6	
2.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	15	5	6	-	-	
3.	Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Palopo	17	33	5	-	1	
TOTAL		375	292	95	-	7	

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

3. Lalulintas Orang Asing



Data lalu lintas orang (WNI dan WNA) dari dan ke luar negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut dan udara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

Lalu lintas WNI dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **40.701** orang.

2. Warga Negara Asing

Lalu lintas WNA dari dan ke luar negeri melalui Laut/ Udara sebanyak **6.691** orang.

Tabel 18 Data Lalu Lintas Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kegiatan	Triwulan II Tahun 2019	
	Makassar	Pare-Pare
KAPAL		
Kapal Datang		
- Crew WNI	355	-
- Crew WNA	584	183
- Penumpang WNI		-
- Penumpang WNA		-
Kapal Berangkat		
- Crew WNI	373	-
- Crew WNA	646	182
- Penumpang WNI		-
- Penumpang WNA		-
PESAWAT		
Pesawat Datang		
- Crew WNI	256	
- Crew WNA	217	
- Penumpang WNI	20.236	
- Penumpang WNA	2251	
Pesawat Berangkat		
- Crew WNI	255	
- Crew WNA	212	
- Penumpang WNI	19.226	
- Penumpang WNA	2416	
PLB / BCC		
Crew Pas / CCC		

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

4. Pengawasan

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian selama Triwulan II Tahun 2019, telah dilakukan pedetensian, pemindahan, pemulangan/pengungsian/pendeportasian Warga Negara Asing dari berbagai kebangsaan pada periode Triwulan II (April s.d Juni) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 19 Pengungsi di Dalam Rudenim

NO.	STATUS	ASAL NEGARA DETENI	April		Mei		Juni	
			L	P	L	P	L	P
1.	Pedetensian	Afganistan	-	-	2	-	4	-
		Thailand	1	-	1	-	1	-
		Palestine	1	-	-	-	-	-
		Myanmar	2	-	-	-	3	-
2.	Pemindahan	Myanmar	2	-	2	-	-	-
		Afganistan	1	-	8	9	-	-
		Somalia	4	-	-	-	-	-
		Iran	1	-	-	-	-	-
		Palestine	-	-	1	-	-	-
		Ethiopia	-	-	1	-	1	-
3.	Pendeportasian	Filipina	1	-	-	-	-	
Total			13	0	15	9	10	0

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian

Warga Negara Asing yang terbukti melanggar izin masuk maupun izin tinggal yang diberikan kepadanya akan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Namun, karena keterbatasan tempat dan daya tampung dari Rudenim, maka beberapa pengungsi akan ditempatkan di luar Rudenim, yakni pada *Community House* yang tersebar di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, namun tetap dalam pengawasan dari Rudenim Makassar. Adapun data pengungsi yang ada di luar Rudenim seperti pada tabel 20 :

Tabel 20 Pengungsi di luar Rudenim

No.	Nama Penginapan	Nama Negara Asal												Total	
		AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	PAK	IRQ	LKA	ETH	PSE	YEM	ERI		EGY
1	KANIM Makassar	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IDC Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Police Custody	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Bugis House	36	-	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	126
5	Kirani Guesthouse	47	6	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	82
6	Ida Guesthouse 1	20	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	23
7	Ida Guesthouse 2	73	-	4	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	71
8	155 Guesthouse A	99	2	16	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	44
9	155 Guesthouse B	1	-	12	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	65
10	155 Guesthouse C	16	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
11	155 Guesthouse D	46	-	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	79
12	Pondok Elite A	78	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	46
13	Pondok Elite B	39	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
14	Pondok Nugraha	49	-	1	19	7	13	-	-	3	-	-	1	-	152



No.	Nama Penginapan	Nama Negara Asal												Total	
		AFG	MMR	SOM	SDN	IRN	PAK	IRQ	LKA	ETH	PSE	YEM	ERI		EGY
15	Pondok Re - Re	14	2	3	9	3	3	16	-	1	-	1	-	1	171
16	Pondok Reski Jaya	84	3	22	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	73
17	Wisma Budi	101	23	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	36
18	D'Win Homestay	69	1	-	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	21
19	Wisma Favorite	36	17	13	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	51
20	Wisma KPI	-	31	1	2	2	4	1	3	-	7	-	-	-	129
21	Wisma Mustika 1	20	14	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	41
22	Wisma Mustika 2	21	22	2	2	5	-	-	6	-	-	-	-	-	48
23	Wisma Mustika 3	34	12	2	9	-	-	5	-	-	-	-	-	-	63
24	Wisma Maysara	80	14	15	2	6	9	5	-	3	-	-	-	-	148
25	Wisma MSM	11	20	10	1	7	5	-	12	4	-	-	-	-	71
26	Wisma Marindi	23	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	30
27	Wisma D-Khanza	97	15	6	2	4	-	-	-	5	-	-	-	-	60
28	Wisma Baji rupa	35	-	-	-	2	11	-	-	-	-	2	-	-	81
29	Pondok Maryam	43	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Total	1.188	1.177	195	146	50	42	47	28	25	8	5	1	1	1.811

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi , data diolah oleh Divisi Keimigrasian.

5. Tindakan Administratif dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Kantor Wilayah melalui upt keimigrasian memiliki tugas untuk memberikan tindakan administratif dan penegakan hukum keimigrasian bagi pelanggar hukum keimigrasian. Adapun tindakan administrasi dan penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan pada periode Triwulan II (April s.d Juni) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21 Tindakan Administrasi dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	APRIL	MEI	JUNI
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	2	3	7
2	RUMAH DETENSI IMIGRASI	1	-	6
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	-	1	2
4	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO		1	2
	TOTAL	3	5	17

Sumber: Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

D. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-



undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah terdiri atas tiga bidang. Yakni, Bidang Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Yang kedua, Bidang HAM yang memiliki tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Serta Bidang Pelayanan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum (bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik) dan kekayaan intelektual. Adapun pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Hukum selama periode triwulan II yakni :

1. Pelayanan Kewarganegaraan

Pelayanan kewarganegaraan yang dilayani adalah permohonan Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, pada periode Triwulan II Tahun 2019 permohonan kewarganegaraan yang ada sesuai dengan tabel 18:

Tabel 22 Jenis Pelayanan Kewarganegaraan

NO	JENIS	PERMOHONAN	PNBP	KET.
NIHIL				

Sumber : Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

2. Pelayanan HKI

Dapat dilihat jumlah permohonan di bidang HKI masing-masing pada tabel 19:

Tabel 23 Permohonan HKI

NO	JENIS	JUMLAH PERMOHONAN			JUMLAH PER JENIS
		April	Mei	Juni	
1.	Merk	11	8	7	26
2.	Hak Cipta	26	19	7	52



NO	JENIS	JUMLAH PERMOHONAN			JUMLAH PER JENIS
		April	Mei	Juni	
3.	Paten & Paten Sederhana	0	0	1	1
4.	Desain Industri	2	2	0	4
5.	Indikasi Geografis	0	0	0	0
6.	Lain-lain (Perpanjangan Merek, Pemeriksaan Substantif, Paten, Perubahan Data Pemilik Merek)	6	1	0	7
JUMLAH		39	30	15	84

Sumber : Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

3. Pemberian Bantuan Hukum

Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang terjerat masalah hukum. Tugas tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang ada. Adapun bantuan hukum yang telah dilakukan hingga triwulan II tahun 2019 baik litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan tabel 20:

Tabel 24 Pemberian Bantuan Hukum

NO	ORGANISASI BANTUAN HUKUM	JENIS BANTUAN	
		LITIGASI	NON LITIGASI
1	Yayasan LBH Sinar Keadlian	34	0
2	Yayasan LBH Bhakti Keadilan	47	0
3	LBH Bhakti Keadilan Jeneponto	33	0
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar	14	0
TOTAL		128	0

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

4. Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum

Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan HAM Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai dengan tabel 21 :

Tabel 25 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bantuan Hukum

NO	KEGIATAN	MATERI	NARASUMBER	LOKASI DAN WAKTU
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas OBH dan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	Kebijakan Pelaksanaan OBH dan paralegal	Kepala Kantor Wilayah, Priyadi	Hotel Romedo, 26 April 2019
		Pelaksanaan Bantuan Hukum Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid Batubara	
		Peningkatan Kapasitas OBH dan Paralegal dalam	Kepala Bidang Hukum, Andi Haris	



NO	KEGIATAN	MATERI	NARASUMBER	LOKASI DAN WAKTU
		Pemberian Bantuan Hukum		
2	Sosialisasi OBH	Peranan Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid Batubara	Hotel Romedo, 24 Mei 2019

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

5. Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH)

Selain penyuluhan dan bantuan hukum, Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH juga memiliki perpustakaan JDIH yang berisi buku-buku terkait dengan hukum, politik, administrasi, dll yang bisa diakses oleh umum. Perpustakaan ini terletak di ruang Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH pada Kantor Wilayah. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan sesuai dengan data yang ada pada tabel 22:

Tabel 26 Jumlah Pengunjung

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	April	5
2.	Mei	10
3.	Juni	2
JUMLAH		17

Sumber : Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

6. Legislasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah berkoordinasi melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam pembahasan Ranperda dan agar setiap Perda maupun Ranperda dikirim ke Kantor Wilayah. Data produk hukum daerah yang pernah dikaji dan diharmonisasi sesuai dengan tabel 23 :

Tabel 27 Data Produk Hukum yang dibahas dan dikaji

NO	NAMA KABUPATEN	NOMOR DAN TENTANG	KET
1	Barru	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Telah Diharmonisasi 16 April 2019
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Khusus	
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga at Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
2	Luwu Timur	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	Telah Diharmonisasi 16 Mei 2019
		Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur	



3	Kepulauan Selayar	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	Telah Diharmonisasi 2 Mei 2019
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Daerah	
4	Luwu Utara	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum	Telah diharmonisasi 22 Mei 2019
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabuta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	
5	Luwu Utara	Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Luwu Utara 100 FM	Telah Diharmonisasi 26 Mei 2019
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
6	Bulukumba	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelelangan	Telah Diharmonisasi 27 Juni 2019
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi Badan Pemusyawaratan Desa	
7	Takalar	Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah	Telah Dikaji 2 April 2019

Sumber : Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah , data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

7. RANHAM

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan tugas Kantor Wilayah melalui Subbidang Pemajuan HAM adalah menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM melalui Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMMAS), sesuai yang telah dijabarkan pada tabel 24 :

Tabel 28 Data Laporan Komunikasi maupun Informasi

NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Permohonan Mediasi Mengenai Status Tanah Bapas Klas I Makassar dengan Badan Pertanahan Kota Makassar.	Rekomendasi Ke instansi terkait	2	1. Rapat Koordinasi (29/03/2019) 2. Surat Rekomendasi (04/04/2019)



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2	Permohonan Kepastian mengenai Tindak Lanjut Permohonan Pengalihan Hak Atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Sdr. Mei Tjoe di Kantor Pertanahan Kota Makassar.	Rekomendasi Ke instansi terkait	2	1. Rapat Koordinasi (29/03/2019) 2. Surat Rekomendasi (04/04/2019)
3	Dugaan pelanggaran HAM, Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Sdr. Nurmia Yuanita dan anaknya bernama Naulia.	Rekomendasi Ke instansi terkait	2	1. Rapat Koordinasi (29/03/2019) 2. Surat Rekomendasi (04/04/2019)
4	Permohonan Perlindungan Hukum Terkait Dugaan Pelanggaran HAM dengan Ancaman dan Intimidasi terhadap Sdr. Abdul Rahman yang dilakukan oleh PT. Verena Multi Finance yang melibatkan <i>Debt Collector</i>	-	-	Para Pihak tidak menghadiri undangan koordinasi dan klarifikasi (29/03/2019)
5	Permohonan Mediasi Sdr. Hajrah Aslam mengenai sengketa batas lahan yang melibatkan UIN Alauddin Makassar, Kampus II Samata.	Rekomendasi ke Instansi terkait	2	1. Rapat Koordinasi (26/04/2019) 2. Rekomendasi kepada BPN Gowa (10/05/2019)
6	Permohonan perlindungan dan pendampingan hukum untuk menduduki kembali tanah tempat tinggal Sdr. Hj. Jawiah pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Sultan Abdillah Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.	Koordinasi dan Klarifikasi dengan pihak terkait	2	1. Rapat Telaahan (10/05/2019) 2. Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Yankomas (12/06/2019)
7	Permohonan pendampingan hukum dan mediasi Pengurus Yayasan Shihhatul Iman dengan Pengurus TK/RA Yayasan Generasi Sejahtera yang diduga melakukan pelanggaran terkait pengurusan TK/RA dalam lingkungan Yayasan Shihhatul Iman.	Koordinasi dan Klarifikasi dengan Para Pihak	4	1. Rapat Telaahan (10/05/2019) 2. Rapat Koordinasi dan Klarifikasi (12/06/2019) 3. Koordinasi Langsung (25/06/2019) 4. Rapat Koordinasi (27/06/2019)
8	Permohonan Mediasi Sdr. Ernawati untuk Akses Jalan ke Tempat Tinggal ybs di Jalan Pelelangan Tekolabbua, Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Koordinasi dan Klarifikasi dengan para pihak	2	1. Rapat Telaahan (21/06/2019) 2. Koordinasi langsung



NO	PELAYANAN	TINDAK LANJUT	JUMLAH TINDAK LANJUT	KETERANGAN
				(25/06/2019)
9	Pengaduan Pelanggaran HAM di Kawasan Hutan Adat Tondok Kao, Tana Toraja	Koordinasi dengan instansi terkait	2	1. Rapat Telaahan (21/06/2019) 2. Koordinasi langsung dengan Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan (25/06/2019)
10	Dugaan Pelanggaran Wewenang Jabatan oleh Kepala Rutan Kelas IIB Masamba yang disampaikan oleh <i>Law Firm Rei and Associates</i>	Koordinasi dan klarifikasi	2	1. Rapat Telaahan (21/06/2019) 2. Rapat Koordinasi dan klarifikasi (27/06/2019)

Sumber: Subbidang Pemajuan HAM, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

8. Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

Tabel 29 Kajian Permasalahan Hukum dan HAM

NO.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Ket
NIHIL			

9. Kenotariatan dan PPNS

Sampai dengan saat ini jumlah Notaris se Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 447 orang. Dan dalam rangka pembinaan Notaris masih terbatas karena masih minimnya anggaran yang tersedia.

Tabel 30 Daftar Jumlah Notaris di Wilayah Sulawesi Selatan

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Notaris
1	Kab. Barru	4
2	Kab. Bantaeng	4
3	Kab. Wajo	10
4	Kab. Gowa	73
5	Kab. Bulukumba	5
6	Kab. Sidrap	11
7	Kab. Pangkep	14
8	Kota Makassar	144
9	Kab. Enrekang	3
10	Kota Palopo	16



No	Kota / Kabupaten	Jumlah Notaris
11	Kab. Luwu Timur	3
12	Kota Parepare	21
13	Kab. Sinjai	3
14	Kab. Jeneponto	2
15	Kab. Soppeng	4
16	Kab. Luwu utara	2
17	Kab. Bone	23
18	Kab. Toraja Utara	3
19	Kab. Tana Toraja	3
20	Kab. Luwu	5
21	Kab. Maros	57
22	Kab. Pinrang	13
23	Kab. Selayar	2
24	Kab. Takalar	22
Jumlah		447

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 31 Data Notaris

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Notaris Baru	5
2.	Notaris Pindahan dari luar Sulawesi Selatan	-
3.	Notaris Pengganti	3

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan

Tabel 32 Pelantikan Notaris

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pelantikan Notaris Baru	Mei = 1
2.	Pelantikan Notaris Pengganti	April = 1

Sumber: Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, data diolah oleh Subbagian Program dan Pelaporan



6. MASALAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019 sampai dengan akhir triwulan II kerap menemui kendala dan masalah yang ditemui. Adapun kendala yang dihadapi setiap divisi adalah sebagai berikut :

A. Divisi Administrasi

1. Bagian Umum

- a. Belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Pengusulan RKBMN Revisi Tahun 2019 banyak yang tidak disetujui terkendala usulan kebutuhan ada yang melebihi SBSK karena banyak barang yang sudah rusak berat tetapi belum dihapuskan;
- c. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dari beberapa DIPA yang ada di Kantor Wilayah belum memenuhi target nilai yang ditetapkan. Adapun yang mempengaruhi hal tersebut adalah pengelolaan UP yang mengalami keterlambatan dan adanya deviasi antara rencana Halaman III DIPA dan penarikan dana;
- d. Keterbatasan peralatan dalam pelaksanaan tugas, seperti kurangnya jumlah computer, laptop, *Air Conditioner*, Kamera DSLR, *Scanner*, Printer, dan Proyektor.

2. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

- a. Pengumpulan bahan dan data laporan triwulan membutuhkan waktu yang agak lama dikarenakan pengumpulan data mulai dari tingkat UPT;
- b.

B. Divisi Pemasyarakatan

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Kerja Sama

- a. Sidang TPP memerlukan Data Usulan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) dan Tim yang memenuhi kuota dalam Sidang, namun terkadang pada beberapa kali Sidang belum mencukupi persyaratan yang ada;
- b. Belum tersedianya dana dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan layanan Informasi, namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut;
- c. Kurangnya SDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari kegiatan pengelolaan SDP.

2. Bidang Pelayanan Tahanan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan



- a. Diperlukan tambahan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pencegahan dan penindakan Kamtib karena anggaran yang tersedia terbatas untuk kegiatan dalam kota;
- b. Diperlukan tambahan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pencegahan dan penindakan Kamtib karena anggaran yang tersedia terbatas untuk kegiatan di dalam kota;
- c. Diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Layanan Pengaduan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut;
- d. Seringnya terjadi keterlambatan pengumpulan laporan dari Lapas maupun Rutan.

C. Divisi Keimigrasian

1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan;
 - b. Luasnya wilayah kerja subbidang intelijen sehingga perlu pengadaan SDM dan kendaraan operasional;
 - c. Tidak mempunyai alat penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok intelijen seperti kamera dan *handycam*;
 - d. Belum adanya anggaran untuk melakukan proses penindakan keimigrasian;
 - e. Masih kurangnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Kurangnya pengetahuan staf di upt terkait Teknik-teknik dalam hal operasi pengawasan dan intelijen keimigrasian;
 - g. Fasilitas dan ruang detensi kurang memadai;
 - h. Banyaknya jumlah *Community House* yang mencapai dua puluh tujuh menyulitkan petugas dalam melakukan pengawan.
2. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
 - a. Belum efektifnya aplikasi SIMKIM Versi 2.0 untuk tampilan menu informasi data orang asing pada *e-Office* Divisi Keimigrasian;
 - b. Belum memadainya sarana *e-Office* seperti kurang baiknya kualitas pendinginan pada ruangan server yang disebabkan oleh tidak efektifnya pendinginan oleh mesin AC yang bisa saja berdampak fatal pada alat.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Bidang Hukum
 - a. Kegiatan FPPHD pada bulan Mei hingga Juni hanya dilaksanakan sebanyak tiga kali rapat harmonisasi dan satu kali rapat konsultasi, dan itu belum mencukupi untuk pengajuan penggantian uang persediaan sehingga mengakibatkan belum adanya *revoiring* dalam sebulan terakhir, masalah ini terjadi dikarenakan kurangnya



- pemerintah daerah yang datang ke kantor wilayah untuk melakukan konsultasi dan harmonisasi dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
- b. Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan OBH dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum;
 - c. Bermasalahnya aplikasi dari BPHN sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Perlunya penambahan koleksi buku pada perpustakaan;
 - e. Masih kurangnya partisipasi pengunjung dalam mengisi buku tamu perpustakaan sehingga kurangnya inventarisasi data pengunjung perpustakaan JDIH.
2. Bidang Pelayanan Hukum
- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang permohonan pendaftaran KI seperti komputer, printer dan scanner;
 - b. Masih minimnya pengetahuan SDM mengenai KI;
 - c. Besarnya anggaran DIPA Subbidang Pelayanan AHU berimbas pada persentase penyerapan anggaran yang masih dianggap rendah, padahal dari Triwulan I hingga II Subbidang Pelayanan AHU telah melaksanakan banyak kegiatan seperti sosialisasi Layanan Kenotariatan, Sosialisasi Layana Fidusia, Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan, sewa kendaraan dinas dan kegiatan-kegiatan lain yang memiliki anggaran ratusan juta rupiah;
 - d. Dalam upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Subbidang Pelayanan AHU menemukan kendala terutama kualitas pelayanan.
3. Bidang Hak Asasi Manusia
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang HAM selama triwulan II Tahun 2019, belum ditemukan adanya hambatan yang berarti.

7. PEMECAHAN MASALAH

Dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia maupun anggaran, segala kendala dan masalah yang dihadapi dicoba untuk mencari pemecahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kendala dan masalah menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan Kantor Wilayah. Adapun beberapa pemecahan masalah yang dilakukan oleh setiap divisi adalah :

A. Divisi Administrasi

1. Bagian Umum
 - a. Penataan dan penertiban pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. Telah dilakukan pengusulan penghapusan BMN ke Sekretariat Jenderal;



- c. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Nilai IKPA secara intens sekaligus melakukan langkah-langkah perbaikan seperti : melakukan revisi DIPA secara selektif, meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (Halaman III DIPA), meningkatkan ketepatan waktu dalam revolving up, serta ketepatan waktu dalam penyampaian LPS Bendahara pengeluaran/penerimaan;
 - d. Perlunya diadakan pengadaan.
2. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Format data dan bahan laporan triwulan dikirimkan setiap akhir triwulan, dan akan diingatkan pada tanggal 1 setiap awal triwulan, agar laporan triwulan dapat disusun dengan baik dan cepat;
 - b.

B. Divisi Pemasyarakatan

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Kerja Sama
 - a. Kegiatan Sidang TPP dilakukan apabila ada usulan dari UPT dan anggota TPP dihadiri minimal 60% dalam Sidang;
 - b. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana pendukung;
 - c. Perlunya penambahan SDM agar tidak terjadi kerja rangkap.
2. Bidang Pelayanan Tahanan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan
 - a. Penambahan anggaran untuk melakukan perjalanan keluar kota;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. Meningkatkan komunikasi efektif kepada setiap UPT agar senantiasa memenuhi pengiriman laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

C. Divisi Keimigrasian

1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Perlunya penganggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Perlunya penganggaran untuk kendaraan dinas dan SDM;
 - c. Perlunya pengadaan peralatan pendukung fungsi dan tugas intelijen;
 - d. Sudah ada usulan anggaran untuk proses penindakan keimigrasian untuk tahun anggaran 2020;
 - e. Perlu adanya penambahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - f. Perlunya diadakan pelatihan staf mengenai operasi pengawasan dan intelijen keimigrasian;
 - g. Pengadaan fasilitas ruang detensi berupa tempat tidur, serta dilakukan perbaikan fasilitas Ruang Detensi dan kamar mandi;
 - h. Telah ada pengusulan penyatuan *Community House* ke Pemerintah Kota Makassar menjadi Sembilan tempat penampungan.



2. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

- a. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak Timtik pada Dit Sistik Jakarta;
- b. Telah dilaporkan ke bagian umum dan telah diadakan beberapa kali perbaikan, namun kondisi mesin pendingin ruangan belum berjalan dengan baik.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Bidang Hukum

- a. Perancang harus berperan aktif untuk menghubungi Pemerintah Daerah sesuai dengan zonasi masing-masing, sehingga diharapkan setiap Pemda agar mau berkerja sama dan senantiasa meningkatkan kolaborasi dan kerja sama misalnya dengan cara penandatanganan MoU tentang kerja sama antara kantor wilayah dan Pemda dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
- b. Senantiasa dilakukan koordinasi dengan BPHN;
- c. Pelaksanaan sesuai aplikasi dapat dilakukan secepatnya mulai dari Triwulan II;
- d. Perlu penambahan koleksi baik dari pengadaan maupun hibah;
- e. Perlunya untuk mengingatkan setiap pengunjung yang datang untuk selalu mengisi buku tamu agar semua kegiatan yang terkait perpustakaan dapat terdokumentasi dengan baik.

2. Bidang Pelayanan Hukum

- a. Perlunya pengadaan komputer, scanner dan printer. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Perlunya SDM subbidang Pelayanan KI untuk diikutkan Diklat maupun Bimtek mengenai KI;
- c. Subbidang Pelayanan AHU dalam meningkatkan level penyerapan anggaran perlu menggenjot kegiatan berupa perjalanan dinas ke daerah maupun pusat. Perjadi sangat memungkinkan untuk mendongkrak penyerapan anggaran sehingga diharapkan jangan ada pembatasan perjadi agar persentase penyerapan dapat diakselerasi;
- d. Subbidang pelayanan AHU perlu meningkatkan layanan berupa perbaikan SOP, fasilitas layanan yang memadai berupa ruang pelayanan yang representative serta peningkatan kualitas SDM yang lebih baik dengan pemberian reward dan punishment secara berkala.



BAB III PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan selama Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi

Pelaksanaan tugas pada Divisi Administrasi meliputi : Program dan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Pengurusan Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sudah berjalan dengan baik.

2. Divisi Pemasyarakatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Divisi Imigrasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Imigrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tugas-tugas dan kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang disediakan dalam DIPA tahun 2019.

B. SARAN

1. Divisi Administrasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Administrasi perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang profesional khususnya dalam hal keprotokolan dan Peliputan/ Jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Divisi Pemasyarakatan

Dalam Tugas dan fungsi Pemasyarakatan perlu penambahan operator, dan sumber daya anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pemindahan Narapidana/ Tahanan harus sesuai dengan Kalender Kerja.

3. Divisi Imigrasi

Divisi Imigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi melayani dan mengawasi lalu lintas Orang Asing dari dan keluar Indonesia perlu di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berwawasan luas, menguasai bahasa Asing, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.



4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM perlu adanya sarana dan prasarana, serta melakukan koordinasi dan kerjasama secara terus menerus dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan II Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Priyadi
NIP. 19630811 198703 1 001